



RENCANA KERJA 2025

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita sekalian, Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan telah dapat diselesaikan sebagai amanat setiap tahun pelaksanaan rencana kerja OPD. Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan acuan utama bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan program pembangunan di sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian selama tahun 2025 dalam mendukung pembangunan Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2025 penentuan target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2025 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Periode 2021 – 2026. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro dan perindustrian.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 ini, kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam melakukan tugasnya dan semoga Rencana Kerja Tahun 2025 dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Aamiin.

Pacitan, Agustus 2024

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN



PRAYITNO, ST. MT.
Rembina Tk. I
NIP. 19680610 199202 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	8
	1.1.Latar Belakang	8
	1.2.Landasan Hukum Penyusunan	8
	1.3.Maksud Dan Tujuan	10
	1.4.Sistematika Dokumen Perubahan Renja	10
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024	11
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB IV	PENUTUP.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan Pasal 355 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. disebutkan bahwa penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); KEPRES RI Nomor : 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9;

- h. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tahun 2025.
- 1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Tahun 2025 ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2025 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Pacitan.

2. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN

Bab I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB II

EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan renja triwulan II tahun 2024 dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2021-2026. Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Review terhadap rancangan awal Renja.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan untuk tahun 2021-2026. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustria Kabupaten Pacitan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

TABEL 2.1. LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
PERIODE : JUNI (TRIWULAN II)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	80	3.432.276.334,00	0,00	701.431.560,00	76,45	1.035.148.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	1.736.579.956,00	95,56	50,60
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dokumen	21	12.514.210,00	4,00	12.446.900,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.446.900,00	47,62	99,46	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	21	12.514.210,00	4,00	12.446.900,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.446.900,00	47,62	99,46	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																47,62	99,46
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ladministrasi keuangan Perangkat Daerah	dokumen	59	2.685.149.089,00	12,00	458.020.060,00	15,00	899.276.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	1.357.296.690,00	45,76	50,55
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	2.638.929.089,00	21,00	446.460.160,00	21,00	889.466.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1.335.926.790,00	100,00	50,62
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	45	46.220.000,00	0,00	11.559.900,00	21,00	9.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21369900	46,67	46,24
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																73,34	48,43
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	%	100	44.219.000,00	25,00	16.446.000,00	25,00	16.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	32.929.000,00	50,00	74,47
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	33.019.000,00	0,00	16.446.000,00	2,00	16.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	32.929.000,00	100,00	99,73
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	13	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																50,00	49,87
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	317.531.270,00	25,00	63.727.700,00	25,00	68.489.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	132.216.853,00	50,00	41,64
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	112.657.000,00	1,00	29.557.200,00	1,00	12.974.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	42.532.100,00	100,00	37,75
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	24.984.270,00	1,00	525.000,00	1,00	23.327.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	23852650	100,00	95,47
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	179.890.000,00	1,00	33.645.500,00	1,00	32.186.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	65832103	50,00	36,60
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																83,33	56,61
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	%	100	24.695.500,00	25,00	7.500.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.500.000,00	50,00	30,37
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	17.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.560.500,00	0,00	7.500.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7500000	100,00	99,20
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																50,00	49,60

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	%	100	239.206.860,00	25,00	49.419.000,00	25,00	49.344.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	98.763.613,00	50,00	41,29
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	94.803.060,00	3,00	14.808.645,00	3,00	16.759.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	31.568.471,00	50,00	33,30
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	144.403.800,00	3,00	34.610.355,00	3,00	32.584.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	67195142	50,00	46,53
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																50,00	39,92
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	80	108.960.405,00	20,00	93.871.900,00	20,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	95.426.900,00	50,00	87,58
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	4.768.905,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	5,56
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	12.909.000,00	1,00	2.697.300,00	5,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4252300	60,00	32,94
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	paket	1	91.282.500,00	1,00	90.909.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	90909600	100,00	99,59
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																53,33	46,03
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																49,05	60,77
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha	%	4.87	25.000.000,00	7,85	17.888.500,00	0,00	7.016.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	24.904.760,00	161,19	99,62
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin usaha simpan pinjam koperasi yg diterbitkan	%	47	25.000.000,00	0,00	17.888.500,00	0,00	7.016.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.904.760,00	0,00	99,62
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	100	25.000.000,00	100,00	17.888.500,00	0,00	7.016.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24.904.760,00	100,00	99,62
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																100,00	99,62
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																0,00	99,62
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi yang dikelola secara akuntabel	%	100	40.000.000,00	0,00	22.036.000,00	38,50	2.651.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	24.687.300,00	38,50	61,72
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yg diperiksa dan diawasi	%	34.2	40.000.000,00	0,00	22.036.000,00	30,84	2.651.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	24.687.300,00	90,18	61,72
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	40	40.000.000,00	40,00	22.036.000,00	0,00	2.651.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	24.687.300,00	100,00	61,72
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																100,00	61,72
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																90,18	61,72
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	4.48	30.000.000,00	0,00	8.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514.000,00	0,00	28,38
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	%	4.48	30.000.000,00	0,00	8.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514.000,00	0,00	28,38
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	25	30.000.000,00	0,00	8.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514.000,00	0,00	28,38
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																0,00	28,38
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																0,00	28,38
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi dengan SDM terlatih	%	22.42	299.332.200,00	0,00	4.150.000,00	11,50	93.672.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	97.822.250,00	51,29	32,68
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	%	0.13	299.332.200,00	0,00	4.150.000,00	0,06	93.672.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	97.822.250,00	46,15	32,68

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	115	299.332.200,00	0,00	4.150.000,00	60,00	93.672.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	97.822.250,00	52,17	32,68
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																52,17	32,68
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																46,15	32,68
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan modal koperasi	%	6	135.500.000,00	0,00	32.464.266,00	3,02	36.082.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	68.546.544,00	50,33	50,59
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KUMKM yang mengakses fasilitas pembiayaan	%	0.46	135.500.000,00	0,00	32.464.266,00	1,50	36.082.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	68.546.544,00	326,09	50,59
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Penagihan Piutang Macet Dana bergulir)	Unit Usaha	100	111.500.000,00	159,00	25.169.684,00	179,00	36.082.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	61.251.962,00	338,00	54,93
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraan (Kerjasama APEX Kopwan)	Unit Usaha	5	24.000.000,00	0,00	7.294.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7294582	0,00	30,39
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																169,00	42,66
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																326,09	50,59
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat legalitas perjanjian dan kapasitas aset	%	2.52	1.170.916.800,00	0,63	130.511.538,00	0,33	290.429.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	420.941.145,00	38,10	35,95
		Persentase usaha mikro dengan kerjasama kemitraan	%	0.14		0,04		0,05		0,00		0,00		0,09		64,29	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	2.1	1.170.916.800,00	0,50	130.511.538,00	0,50	290.429.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	420.941.145,00	47,62	35,95
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Kelas Bisnis dana Business Matching)	Unit Usaha	240	100.000.000,00	120,00	62.425.914,00	120,00	19.832.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	82.258.114,00	100,00	82,26
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (PLUT)	Unit Usaha	300	300.000.000,00	120,00	63.325.624,00	80,00	74.837.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	138163502	66,67	46,05
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	155	770.916.800,00	85,00	4.760.000,00	25,00	195.759.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	200519529	70,97	26,01
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																79,21	51,44
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																47,62	35,95
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas dalam pengelolaannya	%	5.8	123.541.000,00	0,00	20.269.200,00	2,89	16.111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	36.381.000,00	49,83	29,45
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UM yg diberi dukungan fasilitas pemasaran	%	0.51	123.541.000,00	0,13	20.269.200,00	0,13	16.111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	36.381.000,00	50,98	29,45
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Mienial Market Fest, Bazar Ramadhan, Pacitan UMKM Fest)	Unit Usaha	150	123.541.000,00	150,00	20.269.200,00	25,00	16.111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	36.381.000,00	116,67	29,45
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																116,67	29,45
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																50,98	29,45
9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	%	1.22	611.000.000,00	0,35	11.929.884,00	0,35	16.446.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	28.376.087,00	57,38	4,64
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan Draft Perda RPIK	dokumen	1	611.000.000,00	0,00	11.929.884,00	0,00	16.446.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.376.087,00	0,00	4,64
		Jumlah sentra IKM	IKM	5		0,00		5,00		0,00		0,00		5,00		100,00	
		Jumlah IKM yang dibina	IKM	300		76,00		122,00		0,00		0,00		198,00		66,00	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Draft Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	11.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4	100.000.000,00	1,00	11.929.884,00	1,00	16.446.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	28376087	50,00	28,38

		(Promosi Luar Daerah)															
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	9	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																50,00	9,46
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	perusahaan	20	9.000.000,00	3,00	1.659.860,00	0,00	4.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6.536.860,00	15,00	72,63
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	55	9.000.000,00	20,00	1.659.860,00	10,00	4.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	6.536.860,00	54,55	72,63
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	9.000.000,00	1,00	1.659.860,00	0,00	4.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6.536.860,00	100,00	72,63

Tabel 2.2. Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2024 s/d Triwulan II

No	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Usaha di Bidang Koperasi dan UM	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	35.28	30.84
2		% usaha mikro yang berkualitas	4.2	2.89
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan	PDRB Industri Pengolahan	852.33	0
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Nilai Asset Koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	14	2.78
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Tata kelola yang baik				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Tidak semua anggotanya memiliki kesadaran yang penuh dan sama dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kegiatan berkoperasi dengan baik				
Tindak lanjut yang diperlukan :Meningkatkan pengelolaan manajemen koperasi dengan baik (mempertahankan tata kelola yang baik, membenahi kondisi internal, membuat promosi)				
2	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	4.62	2.4
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :- Kemampuan, kemauan, tekad yang kuat dan kerja keras. - Kesempatan dan peluang				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Rendahnya daya saing usaha mikro baik dalam segi kualitas SDM maupun kualitas produk				
Tindak lanjut yang diperlukan :Mengembangkan strategi bisnis usaha mikro				
3	Terwujudnya kinerja pelayanan PD yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	84.2	82.4
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Tersedianya regulasi dan SOP yang jelas				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP				
Tindak lanjut yang diperlukan :Meningkatkan evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan				
4	Meningkatnya kinerja sektor Industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	7.76	0
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Banyaknya jumlah pelaku industri				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :â€¢ Masih rendahnya daya saing dan kualitas produk â€¢ Belum optimalnya struktur industri (hulu-hilir) â€¢ Belum optimalnya sistem informasi dan teknologi industri				
Tindak lanjut yang diperlukan :â€¢ Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara-hilir) â€¢ optimalisasi peneparan teknologi industri, standarisasi industri, dan peningkatan kualitas â€¢ penguatan sistem informasi dan teknologi industri				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman pada renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

Rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1. berikut ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIANKAB. PACITAN
TAHUN 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian						6.075.752.483,00		8.080.412.583,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.221.017.883,00		7.290.412.583,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5.221.017.883,00		7.290.412.583,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50	79,6	80,5	81	3.487.243.683,00	81,5	4.200.528.500,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	21dokumen	21dokumen	21dokumen	21dokumen	12.140.154,00	21 dokumen	150.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10dokumen	21 dokumen	21dokumen	10dokumen	12.140.154,00	10 dokumen	75.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	0	0	0	0	13 Laporan	75.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	59dokumen	59dokumen	59dokumen	59dokumen	2.801.886.069,00	59 dokumen	2.775.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	22 Orang/bulan	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.763.135.069,00	25 Orang/bulan	2.650.000.000,00

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	12 Dokumen	38.751.000,00	45 Dokumen	50.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 dokumen	0	0	0	0	36 dokumen	75.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan	6dokumen	0	0	0	0	6dokumen	6.000.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6dokumen	0	0	0	0	6dokumen	6.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	0	100%	100%	106.000.000,00	100%	139.528.500,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	2 paket	0	0	2 Paket	49.528.500,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	0	0	50 Orang	106.000.000,00	65 Orang	90.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	302.116.500,00	100%	325.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	108.555.800,00	1 Paket	115.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.794.300,00	1 Paket	30.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	180.766.400,00	12 Laporan	180.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	15.193.100,00	100%	350.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	50.000.000,00
	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	1 Unit	50.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5 unit	10 unit	1 Unit	15.193.100,00	2 Unit	150.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	1 unit	0	0	1 Unit	100.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	230.428.660,00	100%	270.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	95.803.060,00	12 Laporan	120.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	134.625.600,00	12 Laporan	150.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	19.479.200,00	100%	185.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	4.500.000,00	10 Unit	5.000.000,00

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5 unit	10 unit	5 Unit	14.979.200,00	12 Unit	30.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	0	0	0	0	1 paket	150.000.000,00
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha	5,26%	7,50%	4,87%	5,07%	25.000.000,00	5,26%	65.045.990,00
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	47,40%	46,99%	47%	47,20%	25.000.000,00	47,40%	65.045.990,00
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	35 unit usaha	30 unit usaha	100 unit usaha	100 Unit Usaha	25.000.000,00		65.045.990,00
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dikelola secara akuntabel	100%	100%	100%	100%	35.000.000,00	100%	292.706.956,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	36.60%	34,62%	34,2%	34,40	35.000.000,00	36.06%	292.706.956,00
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha	65 unit usaha	40 unit usaha	35 Unit Usaha	35.000.000,00	125 Unit Usaha	292.706.956,00
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	4.87%	7,50%	4,48%	4,68%	30.000.000,00	4.87%	227.660.966,00

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	4.87%	9,62%	4,48%	4,68%	30.000.000,00	4.87%	227.660.966,00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	40 Unit Usaha	50 unit usaha	25 unit usaha	25 Unit Usaha	30.000.000,00	40 Unit Usaha	227.660.966,00
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi dengan SDM terlatih	24,37%	23,08%	22,42%	23,39%	279.332.200,00	24,37%	279.332.200,00
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	0.15%	0,13%	0,13%	0,14%	279.332.200,00	0.15%	279.332.200,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	140 Orang	120 orang	130 orang	115 Orang	279.332.200,00	140 Orang	279.332.200,00
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan modal koperasi	14%	13,63%	14%	14%	139.156.400,00	14%	225.137.971,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KUMKM yang mengakses fasilitas pembiayaan	0.4%	0,26%	0,46%	0.4%	139.156.400,00	0.4%	225.137.971,00
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	130 Unit Usaha	67 unit usaha	120 unit usaha	100 Unit Usaha	119.156.400,00	130 Unit Usaha	195.137.971,00
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota									
		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	5 unit usaha	5 unit usaha	5 unit usaha	5 Unit Usaha	20.000.000,00	5 unit usaha	30.000.000,00
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat legalitas perizinan dan kapasitas aset	2,60%	2,50%	2,52%	2,56%	1.125.285.600,00	2,60%	1.500.000.000,00

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang dibina	2.3%	2,82%	2,1%	2,2%	1.125.285.600,00	2.3%	1.500.000.000,00
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	45 Unit Usaha	0	240 Unit usaha	35 Unit Usaha	95.543.200,00	45 Unit Usaha	250.000.000,00
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	250 Unit Usaha	210 unit usaha	0	0	0	250 Unit Usaha	250.000.000,00
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	490 Unit Usaha	495 unit usaha	300 unit usaha	200 Unit Usaha	288.825.600,00	490 Unit Usaha	250.000.000,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan								
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	280 orang	120 orang	155 orang	150 Orang	740.916.800,00	280 orang	750.000.000,00
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan UMKM naik Kelas dalam pengelolaannya	6,6%	5,10%	5,80%	6,6%	100.000.000,00	6,6%	500.000.000,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UM yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	0.53%	0,93%	0,51%	0,52%	100.000.000,00	0.53%	500.000.000,00
	Pengembangan Usaha Mikro								
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	140 Unit Usaha	940 unit usaha	150 unit usaha	200 Unit Usaha	100.000.000,00	140 Unit Usaha	500.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						854.734.600,00		790.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						854.734.600,00		790.000.000,00
9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	1,75%	1,53%	1,40%	1,58%	804.734.600,00	1,75%	760.000.000,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen draft perda RPIK/jumlah sentra IKM/jumlah IKM yang dibina	1/5/300/2dokumen	1/5/300/2dokumen	1/5/300/2dokumen	1/5/300/2dokumen	804.734.600,00	1/5/300/2dokumen	760.000.000,00
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								

		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	293.734.600,00	1 Dokumen	160.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SINas	20%	26,43%	20%	20%	50.000.000,00	20%	30.000.000,00
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	55%	55%	55%	55%	50.000.000,00	55%	30.000.000,00
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00
							6.075.752.483,00		8.080.412.583,00

BAB V

PENUTUP

Renja Tahun 2025 memuat dan menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus evaluasi jalannya penyelenggaraan perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sangat bergantung pada strategi berbagai peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian tujuan “Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA ”.

Pacitan, Agustus 2024
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRODAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

PRAYITNO, ST. MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19680610 199202 1 002